

Meningkatkan Peran Indonesia Dalam Memperkuat Upaya Perdamaian Dunia Melalui Norma Dan Prinsip Hukum Dalam Lembaga Internasional

Yetti Rachmawati, Satria Nugraha.,
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Alter.cepe@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki peran yang relatif penting dalam membentuk stabilitas global pada dinamika politik internasional yg kompleks di saat ini Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif Indonesia pada upaya memperkuat perdamaian dunia melalui penerapan tata cara serta prinsip Hukum pada lembaga internasional. Metode yg dipergunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis naratif, yg melibatkan studi literatur. hasil penelitian membagikan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia melalui partisipasi aktif pada organisasi internasional seperti PBB serta ASEAN. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memperkuat komitmen terhadap tata-cara serta prinsip hukum internasional, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan pada membentuk stabilitas serta perdamaian dunia. implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya diplomatik dan serta kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan bersama yaitu perdamaian dunia.

Kata kunci : Hukum Internasional, Lembaga Internasional, Politik Luar Negeri, PBB, ASEAN

ABSTRACT

Indonesia plays a relatively important role in shaping global stability amidst the current complex dynamics of international politics. This study aims to analyze Indonesia's active role in strengthening global peace efforts through the application of legal norms and principles within international institutions. The method used in this research is a qualitative approach with narrative analysis, involving literature studies. The results of the study indicate that Indonesia has great potential to contribute to global peace efforts through active participation in international organizations such as the United Nations and ASEAN. The conclusion of this study is that by strengthening its commitment to international legal norms and principles, Indonesia can play a more significant role in shaping global stability and peace. The implications of this research are the need for increased diplomatic efforts and closer cooperation with other countries to achieve the common goal of world peace.

Key Words : International Law, International Organization, Foreign policy, UN ASEAN

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di dunia dengan memiliki populasi lebih berasal 270 juta jiwa, memiliki posisi strategis pada kawasan Asia Tenggara. Letaknya yang berada pada persimpangan jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara kunci pada menjaga stabilitas regional dan global. Selain itu, Indonesia hingga saat tulisan ini dibuat adalah anggota aktif dari aneka macam organisasi internasional seperti perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, serta Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai menjadikan platform bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam isu-isu penting Dunia. dalam konteks dinamika politik internasional yg kompleks saat ini, peran Indonesia semakin krusial. perseteruan regional, perubahan iklim, dan tantangan keamanan dunia memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Indonesia, dengan komitmennya terhadap prinsip-prinsip aturan internasional serta diplomasi, dapat memainkan kiprah krusial dalam memediasi konflik, mempromosikan perdamaian, dan mendorong kerjasama multilateral.

Sebagai negara dengan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki peran unik dalam menjembatani dialog antaragama dan budaya. Ini penting dalam konteks meningkatnya ketegangan antaragama dan etnis di berbagai belahan dunia. Melalui diplomasi budaya dan soft power, Indonesia dapat mempromosikan toleransi dan perdamaian.

Selain itu, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung misi perdamaian PBB. Partisipasi aktif pada misi penjaga perdamaian menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. menggunakan memperkuat kapasitas diplomatik serta hukum, Indonesia bisa lebih efektif dalam berkontribusi pada upaya perdamaian dunia.

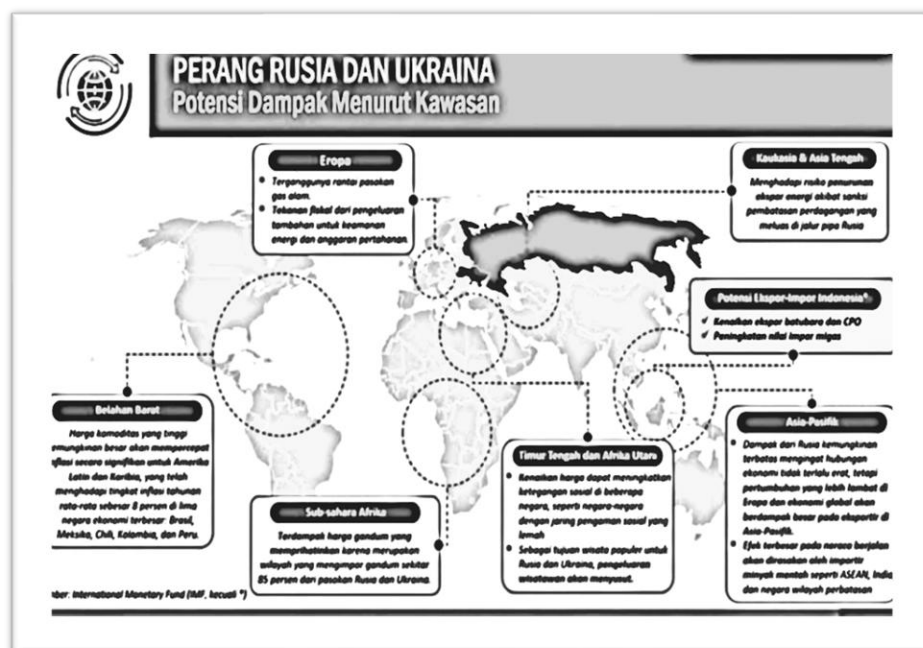
Timbulnya konflik baik regional maupun global pada zaman modern seperti sekarang ini salah satunya terjadi karena adanya pergeseran pusat kekuasaan global, Kebangkitan Ekonomi Negara Berkembang: Negara-negara seperti China dan India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang mengubah lanskap politik global yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan pengaruh ekonomi mereka tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam politik internasional. Dan tidak jarang hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara negara-negara tersebut contohnya konflik antara Ukraina dan Rusia, perseteruan perbatasan antara China dan India.

Pada sisi lain ada juga permasalahan persaingan Geopolitik: Persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia menciptakan ketegangan dan konflik di berbagai wilayah. Misalnya, Laut China Selatan menjadi titik panas karena klaim teritorial yang tumpang tindih dan kehadiran militer yang meningkat dari Angkatan Laut China di Regional.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kemajuan pesat globalisasi industri telah menciptakan sistem ekonomi yang saling terhubung, di mana krisis di satu negara yang berkelanjutan dapat berdampak luas pada ekonomi global. Contohnya, krisis keuangan 2008 menunjukkan bagaimana masalah di sektor perbankan AS dapat memicu resesi global. Krisis Utang Eropa 2010 yang mengakibatkan Ketidakstabilan di pasar

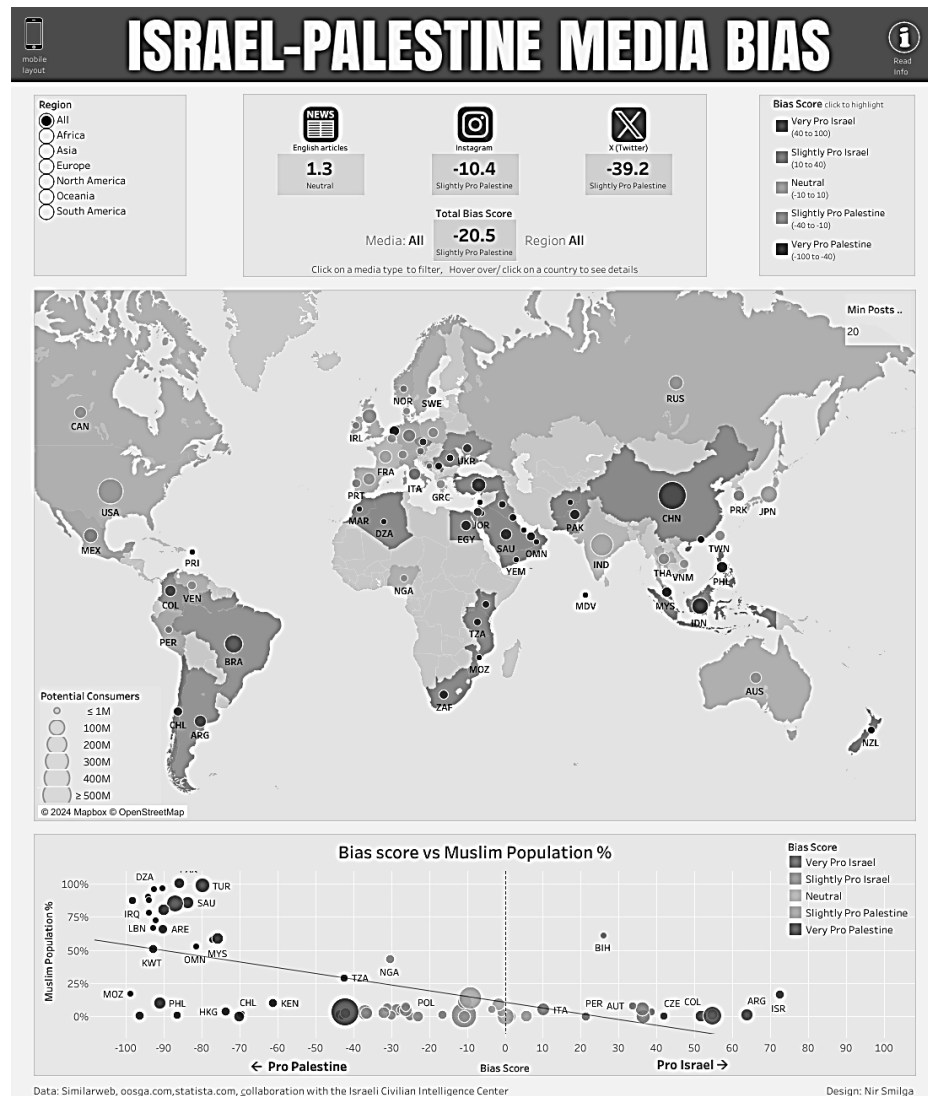
keuangan global, penurunan nilai Euro, dan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak negara Eropa. Krisis ini juga mempengaruhi ekonomi global karena ketergantungan pada perdagangan dengan Eropa.

Sementara globalisasi membuka peluang untuk kerjasama lintas negara dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan teknologi, hal ini juga menciptakan ketegangan baru terkait akses terhadap sumber daya dan teknologi maupun batas wilayah suatu negara. Misalnya yang terbaru adalah konflik Ukraina dan Rusia, Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022 Rusia memiliki kepentingan geopolitik di Ukraina, termasuk akses ke Laut Hitam dan pengaruh di wilayah tersebut. Ukraina yang pro-Barat dianggap sebagai ancaman terhadap pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Konflik ini menimbulkan akibat yang tidak saja dirasakan regional tapi dirasakan juga secara global diantaranya di bidang ekonomi Lonjakan harga minyak dan gas, gangguan pasokan pangan global, krisis kemanusiaan 12.162 warga sipil tewas, 26.919 terluka, jutaan pengungsi kehilangan tempat tinggal, seperti tampak pada grafis berikut:



Gambar 1. Dampak Perang Rusia dan Ukraina menurut kawasan

Kemudian dari sisi Teknnologi, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara negara-negara berinteraksi, berkonflik, dan berkolaborasi. Pada konflik modern Serangan siber menjadi bagian integral dari strategi pertahanan dan keamanan nasional, menunjukkan pentingnya supremasi teknologi dalam politik global. Salah satu sarana yang digunakan adalah Media sosial, pada konflik modern media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan politik suatu negara.



Gambar 2. Dampak Sosial Media terhadap persepsi publik pada konflik Palestina

Kampanye disinformasi dan propaganda melalui platform digital menjadi tantangan baru bagi stabilitas politik internasional. Contohnya dilihat pada kasus Agresi Israel sejak 2023 hingga tulisan ini dibuat . Kedua belah pihak menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan mempengaruhi opini publik. Video, gambar, dan cerita yang mendukung narasi masing-masing pihak sering kali menjadi viral. Setelah viral secara global kemudian munculah Gerakan dari lini masa serta Kampanye seperti Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) menggunakan media sosial untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap Palestina. Gerakan ini berhasil mempengaruhi opini publik dan mendorong aksi nyata seperti pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel. Pada platform X kampanye yang masih di menimbulkan tagar yang trending secara global Tagar seperti #SaveSheikhJarrah dan #FreePalestine digunakan untuk menggagalkan dukungan

global dan meningkatkan kesadaran tentang situasi di lapangan. Ini membantu menciptakan solidaritas internasional dan tekanan politik terhadap pihak-pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teoritis dan metode eksperimen. Metode teoritis adalah metode yang mengkaji konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu Hukum Internasional, lembaga Internasional, dan Kebijakan luar negeri Indonesia. Metode ini dilakukan dengan cara studi literatur, analisis dokumen, dan sintesis teoritis.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Penyelesaian konflik secara diplomasi membantu mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal nyawa manusia maupun kerusakan infrastruktur dan Stabilitas Regional dan Global dimana Diplomasi berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dan global dengan mengurangi potensi konflik bersenjata yang dapat menyebar ke negara-negara sekitar yang pada akhirnya akan berdampak bagi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan mendalam tentang peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia melalui lembaga internasional berdasarkan prinsip prinsip hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Internasional penyelesaian sengkata melalui diplomasi

Dalam hukum internasional, penyelesaian konflik secara diplomasi merupakan prinsip fundamental yang diakui dan didorong oleh berbagai instrumen hukum dan organisasi internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penyelesaian konflik secara diplomasi sangat penting berdasarkan asas dan prinsip hukum Internasional:

A. Prinsip Kedaulatan Negara :

Prinsip kedaulatan negara adalah salah satu pilar utama dalam hukum internasional. Kedaulatan mengacu pada hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa aspek penting dari prinsip kedaulatan negara meliputi:

- a. Integritas Teritorial: Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman atau serangan eksternal.

- b. Non-Intervensi: Negara lain tidak boleh campur tangan dalam urusan domestik negara yang berdaulat.
- c. Kesetaraan Kedaulatan: Semua negara, besar atau kecil, memiliki hak yang sama dalam hukum internasional.

Penghormatan terhadap Kedaulatan: Hukum internasional menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara. Penyelesaian konflik melalui diplomasi memungkinkan negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka tanpa campur tangan eksternal yang bersifat koersif. Piagam PBB: Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Ini penting untuk menjaga hubungan internasional yang damai dan stabil.

- B. Pencegahan Eskalasi Konflik Penyelesaian konflik melalui diplomasi membantu mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal nyawa manusia maupun kerusakan infrastruktur.
- C. Stabilitas Regional dan Global: Diplomasi berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dan global dengan mengurangi potensi konflik bersenjata yang dapat menyebar ke negara-negara tetangga.
- D. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional, seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Ini mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi.
- E. Mahkamah Internasional (ICJ) menyediakan forum hukum untuk penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Negara-negara dapat membawa kasus mereka ke ICJ untuk mendapatkan keputusan yang mengikat

2. Peran Indonesia sebagai anggota dari Organisasi dan lembaga Internasional dalam Penyelesaian Konflik dan Perdamaian Dunia

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, memfasilitasi kerjasama antar negara, dan menegakkan hukum internasional. Berikut adalah beberapa peran utama yang dapat digunakan oleh Indonesia sebagai bagian dari organisasi internasional:

- a. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa
 - 1. PBB, melalui Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal, dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional. PBB menyediakan forum untuk negosiasi dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, serta mengirim misi penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata dan mendukung proses perdamaian. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957. Indonesia mengirimkan personel militer dan polisi untuk berbagai misi di seluruh dunia, termasuk di Kongo, Lebanon, dan Sudan. Indonesia juga telah beberapa kali menjadi

anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di mana Indonesia berperan dalam pengambilan keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan internasional.

Berikut adalah beberapa contoh nyata di mana Indonesia berperan dalam pengambilan keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan internasional di Dewan Keamanan PBB:

- a. Pada tahun 2019, Indonesia memainkan peran penting dalam pengesahan Resolusi 2462 yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Resolusi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi pendanaan terorisme dan memperkuat mekanisme hukum untuk mencegah aliran dana ke kelompok teroris
 - b. Indonesia juga berperan dalam pengesahan Resolusi 2538 pada tahun 2020, yang merupakan resolusi pertama yang secara khusus menyoroti peran perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Resolusi ini mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam misi perdamaian dan menekankan pentingnya perspektif gender dalam operasi perdamaian
 - c. Selama masa keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020, Indonesia aktif terlibat dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Indonesia mendukung proses perdamaian yang dipimpin oleh Afghanistan dan mendorong dialog inklusif antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban
 - d. Indonesia secara konsisten mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina. Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara dan menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
 - e. Indonesia juga aktif dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB untuk membuatnya lebih representatif dan efektif. Indonesia mengusulkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan inklusif, serta peningkatan peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan
2. Organisasi seperti Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE), dan khususnya ASEAN Dimana Indonesia berada, juga memainkan peran penting dalam mediasi konflik regional. Mereka menyediakan mekanisme untuk dialog dan negosiasi, serta mendukung inisiatif perdamaian di wilayah mereka. Berikut adalah beberapa contoh nyata di mana Indonesia berperan dalam pengambilan keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan internasional di ASEAN
 - a. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) Indonesia memainkan peran kunci dalam merumuskan dan mendorong adopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Setelah 18 bulan lobi intensif oleh Indonesia, konsep ini akhirnya diadopsi pada KTT ASEAN di Bangkok pada Juni 2019. AOIP menekankan prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi,

penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik.

- b. Indonesia telah aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, terutama setelah kudeta militer pada Februari 2021. Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, mendorong dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi damai. Indonesia juga mendukung inisiatif ASEAN untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar guna memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa.
- c. Indonesia berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa di Laut China Selatan melalui dialog dan negosiasi. Indonesia mengusulkan konsep "Zone of Peace, Freedom, and Neutrality" (ZOPFAN) dan mendorong ASEAN untuk mengadopsi Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) pada tahun 2002. Indonesia terus mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
- d. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam menyelesaikan konflik internal secara damai.
- e. Indonesia aktif dalam mempromosikan kerjasama keamanan maritim di ASEAN. Melalui inisiatif seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), Indonesia mendorong kerjasama dalam penanggulangan kejahatan maritim, pencurian ikan, dan penyelundupan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di perairan ASEAN.
- f. Indonesia berperan dalam mediasi konflik di negara-negara anggota OKI, seperti Palestina dan Afghanistan. Indonesia juga aktif dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian di dunia Islam
- g. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika pertama pada tahun 1955, yang mempromosikan solidaritas dan kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika. KAA menjadi platform penting untuk dialog dan kerjasama dalam upaya perdamaian dan Pembangunan
- h. Indonesia aktif dalam WTO untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan mengurangi hambatan perdagangan internasional. Ini membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan damai
- i. Indonesia berpartisipasi dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi yang dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global

3. Langkah Upaya meningkatkan peran Indonesia terkait perdamaian dan keamanan internasional di ASEAN dan PBB

Untuk meningkatkan peran Indonesia dalam pengambilan keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan internasional di ASEAN dan PBB, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Berikut adalah beberapa contoh nyata dan aplikatif :

- a. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi diplomat dan personel militer yang terlibat dalam misi perdamaian. Ini termasuk program pelatihan khusus tentang mediasi, negosiasi, dan hukum internasional. Indonesia dapat mengadakan program pelatihan bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan PBB untuk meningkatkan keterampilan diplomatik dan operasional personel yang terlibat dalam misi perdamaian.
- b. Membangun aliansi strategis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk kerjasama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya dengan memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan dengan negara-negara anggota PBB melalui inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
- c. Mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB, termasuk mengusulkan resolusi dan inisiatif perdamaian. Indonesia dapat mengusulkan resolusi yang mendukung perlindungan perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata, serta mendorong dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.
- d. Mengembangkan kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian dan stabilitas global. Ini termasuk komitmen terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian.
- e. Mengambil peran kepemimpinan dalam ASEAN untuk mempromosikan inisiatif perdamaian dan keamanan. Ini termasuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara anggota. Misalnya Indonesia dapat memimpin inisiatif untuk menyelesaikan konflik di Myanmar melalui mediasi dan dialog inklusif, serta mendukung proses perdamaian di negara tersebut.
- f. Menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dalam misi perdamaian. Ini termasuk penggunaan platform online untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan upaya perdamaian. Indonesia dapat mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan maritim dan keamanan regional

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan Penelitian ini terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia melalui partisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. dengan memperkuat komitmen terhadap Nilai serta prinsip hukum internasional, Indonesia dapat memainkan kiprah yang lebih signifikan pada membentuk stabilitas dan perdamaian international baik regional maupun global. namun, ada tantangan dari dalam serta eksternal yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. buat mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas diplomatik serta hukum, dan kerjasama yg lebih erat menggunakan negara-negara lain dan organisasi internasional. Rekomendasi bagi pemerintah Indonesia termasuk diantaranya peningkatan hubungan diplomasi baik di Tingkat regional maupun global dan aktif dalam misi perdamaian, dan penguatan koordinasi antar forum multilateral. Keanggotaan Indonesia pada lembaga internasional pula bisa menjadi wadah untuk menyampaikan dukungan serta kesiapan Indonesia bagi terjaganya keberlangsungan perdamaian di kawasan regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2003..
- [2] J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 10th ed., Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [3] J. Thontowi and P. Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: PT Rafika Aditama, 2006.
- [4] H. Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- [5] R. F. J. Priyono, Buku Ajar Hukum Diplomatik, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro (Undip-Press), 2012.
- [6] S. Suryokusumo, Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus, Bandung: P.T. Alumni, 2005.

